

ABSTRAK

Peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengatur tentang ketertiban umum, namun dalam prakteknya ketertiban umum merupakan konsep yang abstrak dan luas di Indonesia. Kabupaten Rokan Hilir sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Riau merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999. Setelah mengalami pemekaran, Kabupaten Rokan Hilir mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan yang paling tinggi terjadi di Kota Bagansiapiapi yang merupakan ibukota Kabupaten Rokan Hilir. Perkembangan Kota Bagansiapiapi terlihat dengan banyaknya gedung-gedung pusat perkantoran Kabupaten Rokan Hilir, pembangunan pasar-pasar, dan banyaknya sarana hiburan. Salah satu usaha yang paling memberikan dampak pada Pendapatan Asli Daerah adalah usaha penangkaran burung walet. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi. Selain itu, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data tentang keadaan di Kabupaten Rokan Hilir terkait dengan usaha penangkaran burung walet untuk mempertegas hipotesa penelitian. Pengusaha penangkaran burung walet ini lokasinya tidak sesuai dengan aturan, sehingga izinnya tidak diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu (BPT). Untuk lokasi yang ditolak permohonan izinnya tersebar disemua kecamatan terutama yang ada di dalam Kota Bagansiapiapi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan merupakan implementasi dari peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu berasal dari pelaku usaha pengelolaan sarang burung walet yang selama ini masih banyak tidak memiliki izin dan faktor internal yaitu berasal dari pemerintahan atau instansi terkait.

ABSTRACT

Indonesian legislation has regulates public policy, but in practice public policy is an abstract and comprehensive concept in Indonesia. Rokan Hilir Regency is one of the regencies in Riau Province that had expansion from the division of Bengkalis Regency in accordance to Undang-Undang No. 53 Tahun 1999. After expansion, Rokan Hilir Regency made rapid development. The highest development occurred in Bagansiapiapi City, which is the capital of Rokan Hilir Regency. The development of Bagansiapiapi City can be seen from many central office buildings in Rokan Hilir Regency, the construction of markets, and many entertainment facilities. One of the businesses that have the most impact on local revenue is the swallow breeding business. This study uses a normative juridical approach. Collecting data using interview and observation methods. In addition, information can also be obtained through facts that are stored in the form of letters, diary notes, photo archives, meeting results, souvenirs, activity journals and so on. The research specification used is descriptive analysis, namely to provide data about the situation in Rokan Hilir Regency related to swallow breeding efforts to reinforce the research hypothesis. The location of this swallow breeding is not in accordance with the regulations, so the permit is not issued by the Integrated Licensing Agency (BPT). The locations where the permit application was rejected are scattered in all districts, especially those in Bagansiapiapi City. Based on the research conducted, it can be concluded that it is the implementation of local regulations in Rokan Hilir Regency which is influenced by two factors, namely internal factors and external factors. External factors, namely originating from swallow nest management business actors, which so far still do not have permits and internal factors, namely from government or related agencies